

**ANALISIS HUKUM POSITIF & HUKUM ISLAM TERHADAP
PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK**

(Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjan S1 dalam Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

Oleh

Riki Rivanda Saputra

Npm : 1621040058

Prodi : Ahwal-Syakhshiyah (Konsentrasi Ilmu Hukum)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**ANALISIS HUKUM POSITIF & HUKUM ISLAM TERHADAP
PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK**

(Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjan S1 dalam Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Pengangkatan anak atau adopsi adalah salah satu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga timbul hubungan hukum antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat. Oleh karena itu anak angkat merupakan anak yang berada dalam pemeliharaan sehingga kasih sayang, kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih kepada orang tua angkat.

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang) Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Kelas I A Tanjung Karang. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama tentang Prosedur Pengangkatan Anak dan bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pengangkatan anak.

Metode menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis untuk mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan yang menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan komparatif. Dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sehingga sesuatu yang utuh, memaparkan secara jelas pandangan Hakim, maka berdasarkan kesimpulan dapat kita tarik terhadap jawaban dari inti permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang memandang bahwa Prosedur pengangkatan anak adalah pertama mengajukan permohonan untuk pengangkatan anak, setelah itu ditentukan tanggal dan hari sidang, kemudian dilakukan persidangan setelah itu pengadilan agama memberikan salinan kepada instansi yang berwenang yaitu lembaga di bawah kementerian sosial setelah itu disahkan menjadi anak angkat. Sedangkan tinjauan terhadap anak angkat dalam Hukum Positif adalah orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul orang tua kandungnya, orang tua angkat berkewajiban mendidik serta mengurus anak angkatnya seperti anak kandungnya namun dikecualikan jika menyamakan hak antara anak kandung dan anak angkat, Sedangkan menurut Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris terhadap orang tua angkat melainkan mempunyai kedudukan sebagai pewaris dari orang tua asalnya (kandung). Lantas jikalau orang tua angkat tidak mempunyai kedudukan untuk dijadikan pewaris atas anak angkatnya, maka anak angkat tidak mempunyai hak dalam menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung maupun tidak langsung.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riki rivanda Saputra
Npm : 1621040058
Jurusan/Prodi : Konsentrasi Ilmu Hukum / Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A tanjung Karang)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukri adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, penulis,

Materai

Rp. 6000,-

Riki Rivanda Saputra
Npm. 1621040058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL. Let. kol.Hi. Ednro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Nama : Riki Rivanda Saputra
NPM : 1621040058
Jurusan/Prodi : Ahwal-Syakhsyiah (Konsentrasi Ilmu Hukum)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap
Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan
Agama Kelas I A Tanjung Karang)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

H. Linda Firdawaty, S.Ag., M. H.
NIP. 197112041997032003

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal-Syakhsyiah

H. Rohmat S. Ag., M. H. I.
NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL. Let. kol. H. Edro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)** disusun oleh **Riki Rivanda Saputra NPM. 1621040058** Jurusan **Ahwal Syakhshiyah (Konsentrasi Ilmu Hukum)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H

Penguji III : Eti Karini, S.H.,M.Hum.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Hasanuddin, M. H.
NPM. 196110221993031002

MOTTO

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ

يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya :“ ...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja.

(Q.S Al-Ahzab : 4)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1989), h.666.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya ilmiah yang penuh dengan kesederhanaan akan tetapi membutuhkan ekstra kerja keras serta pengorbanan akan dipersembahkan teruntuk orang yang kusayangi serta begitu berharga dan berjasa dalam perjalanan hidupku selama ini :

1. Teruntuk kedua orang tuaku Ayahanda Senkoneri dan Ibunda Nurlela. Cucuran keringat dan pengorbanan yang tak ada habisnya selalu berikan doa demi keberhasilan anakmu, serta mengantarkanku pada pintu kesuksesan dalam menyelesaikan bangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hari ini adalah buah dari perjuangan Ayahanda dan Ibunda tercinta, “Sungguh” Seandainya Tuhan tak cemburu akan kusembah engkau berdua. Adikku Rica Anggraini Oktavia, semoga kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk beliau.
2. Keluarga Besar Kami (Alm) Kakek, Nenek, Oma, Opa, Paman, Bibi, Kakak dan Adik sepupuku yang selalu menanti keberhasilanku.
3. Temanku yang tidak ada habisnya untuk memberikan *support*.
4. Serta yang kubanggakan almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Riki Rivanda Saputra di lahirkan di Kota Bandar Lampung 14 November 1997, putra pertama dari dua bersaudara. Pasangan dari Bapak Senkoneri dan Ibu Nurlela.

Pendidikan dimulai dari TK (Taman Kanak-kanak) Among Putra Gunung Sulah Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung tahun 2004, melanjutkan pendidikan ke Sekolah dasar (SD) Negeri 1 Surabaya Bandar Lampung dimana dapat menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2010, melanjutkan bangku pendidikan menengah pertama di SMP PGRI 6 Bandar Lampung dengan tahun selesai 2013, selanjutnya melanjutkan sekolah di SMK N 1 Bandar Lampung jurusan Multimedia, penulis aktif berbagai kegiatan sekolah mulai dari kegiatan ekstra sekolah yaitu, Organisasi Intra Sekolah (Osis), Sebagai Ketua Umum (Marching Band), Dewan Penggalang Putra (Pramuka), dan Ketua Umum di (Paskibra).

Pada tahun 2016 dilanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi UIN Raden Intan Lampung, program strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah Program Studi Ahwalus Syakhsyah (Konsentrasi Ilmu Hukum).

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu, pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)” dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Shalawa dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda besar Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikutnya. Salam Ta'zim kepada para Waliyullah, Kiyai dan Alim Ulama.

Penulisan karya ini adalah bagian dari salah satu syarat guna menyelesaikan studi (S1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung agar mendapatkan gelar sarjana hukum (SH). Pada disiplin ilmu syariah/hukum atas peran serta semua yang terlibat dalam proses penyelesaian karya ini saya pribadi tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang terlibat ialah diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M. H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

- selaku Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu tanggap atas keluhan mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Rohmat S. Ag., M. H. I selaku Ketua Program Studi Ahwal-Syakhshiyah (Konsentrasi Ilmu Hukum) .
 4. Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M. H. dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum.selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II, yang selalu membantu dan membimbingku dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung serta Guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama penulis menduduki bangku kuliah hingga selesai.
 6. Bapak dan ibu para staf/karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung.
 7. Bapak Dr. K.H. M. Wagianto, M.H selaku kepala perpustakaan pusat, atas pelayanannya terhadap mahasiswa yang membutuhkan referensi buku .
 8. Keluarga besar Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini, yaitu Hakim bapak Drs. H. Shalahuddin Haji Abas, M.H., kepada Panitera Ibu Mahmilawati, S.H., M.H., dan staf/karyawan yang membantu dalam proses wawancara kepada Majelis Hakim.
 9. Sahabat-sahabatku, Gita Safitri Zanela, Fitria Sarasw, Gita Putri Utami, Ayu Praselia Karnadi S, Much Irfan Syah, Kiki Nurul Husna, Bella Fransiska, Lenny Riris Tanti, Ristha Moudice, Zaidan Yahya, Abdul Aziz, SH, (MH, MM) Calon bergelar), Fajar Muhammad Irsan, Ambar Veronicha dan lain-lain

yang tak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu setia menemani dan membantuku dalam suka maupun duka, semoga kita menjadi orang yang sukses dan selalu dalam lindungan Allah Swt.

10. Sahabat-sahabat anggota kelas KIH dan angkatan 2016 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Teruskan perjuangan di bidang Hukum, Kalian Luar Biasa.

11. Teman-Teman Kelompok 219 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2019 Desa Simpang Kanan Kabupaten Tanggamus.

12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Penulis sadar dalam penelitian ini dikatakan masih sangat jauh dari kata sempurna namun hal ini tidak lepas dari keterbatasan serta kemampuan penulis sehingga bagi para pembaca sekiranya dapat memberikan saran serta masukan agar dapat menyempurnakan karya ini.

Akhir kata penulis pribadi mengharapkan karya ini bisa dijadikan dan memberikan sumbangsi yang begitu berarti setidaknya dalam pengemban ilmu pengetahuan terkhusus disiplin ilmu ke Islaman seperti halnya pada era sekarang.

Bandar lampung,
Penulis

Riki Rivanda saputra
NPM : 1621040058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Signifikasi Penelitian	11
H. Metode Penelitian	12
BAB II PENGANGKATAN ANAK	
A. Landasan Teori	20
1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif	20
a. Pengertian Anak Angkat	20
b. Sejarah Pengangkatan Anak	21
c. Syarat Pengangkatan Anak dan Orang Tua Angkat	26
d. Tujuan Pengangkatan Anak	27
e. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat dan Anak Angkat	28
f. Akibat Pengangkatan Anak	31
g. Prosedur Pengangkatan anak	35
2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	37
a. Pengertian Anak Angkat	37
b. Sejarah Pengangkatan Anak	39
c. Syarat Pengangkatan Anak dan Orang Tua Angkat	43
d. Tujuan Pengangkatan Anak	43
e. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat dan Anak Angkat	45
f. Akibat Pengangkatan Anak	46

g. Prosedur Pengangkatan anak	48
B. Tinjauan Pustaka	50

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang	56
B. Visi Misi & Tujuan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang	62
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang	65
D. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang	71

BAB IV ANALISIS DATA

A. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang	77
B. Tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengangkatan anak	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Riset
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Provinsi
3. Surat Persetujuan Riset Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA
4. Lembar Disposisi
5. Surat Keterangan Wawancara
6. Daftar Pertanyaan Penelitian
7. Blangko Konsultasi Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu kekeliruan dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut. Adapun dari judul ini adalah **Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)** yang kemudian mengenai uraian-uraian istilah di atas adalah sebagai berikut :

Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami.¹

Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau dari waktu berlakunya. Hukum positif atau bias dikenal dengan istilah *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.²

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash* Al-Quran maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan

¹ Kemdikbud RI, Diakses dari KBBI.Kemdikbud.go.id, Pada Tanggal 14 Mei, Pukul 01:45 WIB.

² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Bina Ilmu, 2001), h. 21

manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.³

Prosedur ialah suatu tata cara dengan suatu beberapa rangkaian tindakan guna mendapatkan sebuah tujuan.⁴

Pengangkatan Anak adalah penghias dan pelengkap kehidupan rumah tangga, karena anak itu nikmat yang diberikan Allah Swt kepada sepasang kekasih yang merajut cinta kasihnya dalam bahtera rumah tangga yang bukan termasuk anak kandung diambil dari kuasa luar.⁵

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan prosedur pengangkatan anak.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul di atas sebagai bahan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.) Alasan Objektif

- a. Dalam suatu tindakan pengangkatan anak yang telah dilakukan permohonan dari orang tua angkat kepada pengadilan agama, kemudian setelah permohonan dikabulkan, penerapan mengenai dalam hal kesejahteraan anak khususnya di sini orang tua angkat sudah terikat tanggung jawabnya terhadap anak hasil adopsi tersebut sehingga secara kekuatan hukum

³ Abdul Wahab Khalab, *Ushul Fiqh*, (Kairo : Maktabah Tijariah al-Kubro, 1423 H), h. 100

⁴ Kemdikbud RI, Diakses dari KBBI.Kemdikbud.go.id, Pada Tanggal 4 Mei, Pukul 11:45 WIB.

⁵ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 25

mengikat orang tua harus dapat memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak dari anak angkat selain itu adanya pemenuhan juga dari anak angkat mengenai kewajibannya baik terhadap hak-hak yang diperoleh orang tua angkatnya terhadap kewajiban anak angkat tersebut, tetapi terhadap keluarga angkatnya.

- b. Pembahasan mengenai segala hak-hak anak angkat sangat menarik dibahas karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pemenuhan hak-hak perlu diberikan secara utuh di samping karena untuk kesejahteraan anak akan tetapi di lain sisi itu didasarkan pada ketentuan mengenai perlindungan anak khususnya anak angkat, selain mengenai hak nya di samping itu adanya pemenuhan dari anak angkat terhadap kewajibannya.

2.) Alasan Subjektif

- a. Berdasarkan bagian substansi hukum positif dan hukum Islam mengenai pengangkatan anak di mana kedua subjek dari problem yang dibahas mengenai anak angkat akan tetapi perlunya pembahasan terhadap orang tua angkat yang terdapat ikatan di antara keduanya harus terwujudnya pemenuhan dan selain pemenuhan terdapat juga tindakan yang harus dipenuhi, sehingga terdapat sikap saling tanggung menanggung, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban dari anak angkat dan juga orang tua angkat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- b. Judul tersebut adanya *relevansi* dengan program studi Ahwal-Syakhshiyah , serta literatur yang terkait dalam mendukung judul penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat pengangkatan anak yang semata-mata menjadi salah satu mengapa pengangkatan anak atau adopsi dijadikan salah satu alternatif bagi keluarga yang ingin memiliki keturunan. Di sini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau secara nyata anak akan tetap dalam keluarga aslinya, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dan orang tua angkatnya, melainkan sekedar panggilan anak itu terhadap orang tua angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua asalnya. Di dalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi sebagai salah satu lembaga hukum, di mana dalam arti ini pengangkatan anak sebagai lembaga pengangkatan anak untuk fungsi bagaimana cara atau upaya untuk melanjutkan keturunan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan orang tua angkatnya.

Menjelang diterimanya UU kesejahteraan anak, yaitu UU nomor 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 juli 1979 (Lembaran Negara RI tahun 1979 nomor 32), telah terjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi hukum Islam ketika menyoroti yang

berkenaan dengan adopsi dalam rancangan UU tersebut. Hal ini berdasarkan pada konsep adopsi dalam rancangan UU tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah anak dengan orang tua yang melahirkannya.⁶

Dalam bidang hukum perdata di Indonesia di mana hukum perdata masih berdasarkan pengelolaan penduduk di Indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda terdahulu. Masing-masing hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian.

Didahului oleh UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pada UU tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) juga dalam pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Kemudian di UU nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Pada Bab VIII, khususnya pasal 39 sampai pasal 41 UU tersebut memuat tentang ketentuan pengangkatan anak.⁷ Pengertian pengangkatan anak (Adopsi) beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang pengertian pengangkatan anak sebagai berikut : “Mengangkat

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 51

⁷ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 11

anak sebagai buatan pengambilan anak orang lain dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (Surojo Wignjodipuro).⁸

Definisi anak dalam pasal 1 (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 1 (10) menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”⁹

Ketentuan undang-undang mengenai hak-hak anak di Indonesia yang diatur dalam UU perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Ditegaskan peraturanya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pengertian kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut di atas adalah anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan

⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara 1990), h. 33

⁹ UU Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak. Di samping hukum acara perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. Prosedur pengangkatan anak baik antar-WNI, ataupun antar-WNI dan WNA akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.¹⁰

Hukum Islam dan Pengangkatan anak adalah seorang muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi manusia sesama manusia, saling tolong menolong manusia. Dalam suasana tolong menolong ini, tidak terkecuali upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu, atau miskin. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, jadi juga menolong dan membantu anak-anak bayi yang terlantar, atau tidak mampu itu.

Dalam upaya menolong anak-anak bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung. Berdasarkan ketetapan

¹⁰Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,,h.58.

hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan utama kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.¹¹

Hukum Islam adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak 'nasabnya' sendiri, menurut pandangan Hukum Islam hukumnya mubah atau boleh saja. Dijelaskan dalam Al-Quran yang terdapat dari surat Al-Ahzab ayat 4-5

Hal ini jelas secara prinsipil adanya kesesuaian dengan apa yang disebutkan dalam AL-Quran surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan yang benar, pergilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak

¹¹Rosidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 160.

*mereka, maka (pergilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa saja disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹²

Dalam sistem hukum di Indonesia ketetapan hukum Islam sangatlah mempengaruhi sehingga hal ini dapat terlihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan seperti hukum pernikahan (UU/1/1974), UU tentang Peradilan Agama (UU/7/1989), UU tentang pelaksanaan ibadah haji (UU/17/1999), serta UU Zakat (UU/36/1999). Adanya tindakan dan peraturan ini terbukti memperkuat keberadaan hukum Islam di Indonesia, seperti halnya pembahasan Anak Angkat dalam pembahasan ini yang mana definisi tersebut terdapat di pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.¹³

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai “Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Dengan demikian, menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak.

Tetapi pada umumnya orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak atau adopsi asalkan diberi arti sebagaimana dimaksud oleh agama Islam tadi. dimana pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi kepada anak status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkat, sehingga

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran & Terjemahnya, (Jakarta : Cv. Al-Kautsar).

¹³ Acmad Faidi, Reconstruction of the National Legal System : Study the Implementation of the Maqasid al-Shariah Theory, *Jurnal al-Adalah*, Vol 15, Nomor 2, 2018, h. 312

anak angkat dengan orang tua kandungnya di belakang nama anak angkat tetap menggunakan nama ayah kandungnya dan tidak ada hubungan darah dan hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.¹⁴

Seperti contoh ada seorang pasangan suami dan istri yang ingin mengangkat anak atau mengadopsi anak dari pasangan lain, sehingga tindakan tersebut perlulah adanya beberapa aturan secara administrasi dan praktek dalam prosedur pengangkatan suatu anak angkat selain itu akibat dari pengangkatan anak tersebut perlu adanya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak angkat tersebut serta dari orang tua angkatnya sendiri. Sehingga penulis di sini membahas suatu judul dari latar belakang di atas tentang prosedur-prosedur lengkap dan rinci terhadap pengangkatan anak serta mengetahui hak & kewajiban bagi anak angkat serta orang tua angkat.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang dan Tinjauan pengangkatan anak dalam analisis hukum positif & hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengangkatan anak ?

¹⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*,, h. 176

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian untuk memahami bagaimana prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang.
2. Untuk memahami bagaimana Tinjauan hukum positif dan hukum Islam Terhadap Pengangkatan anak.

G. Signifikan Penelitian

Adapun signifikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi akademis maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama dalam prosedur pengangkatan anak maupun ketentuan terhadap anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam. Pada umumnya dan khususnya dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang dibidang hukum positif dan Islam.
2. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya mampu orang lain pada umumnya selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 program studi *Ahwal-Syakhshiyah* pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁵

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan komparatif.¹⁶

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila jika dilihat dari penelitian ini yang dilihat berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data dan informasi dengan wawancara dan pendataan berkaitan dengan lapangan. Sehingga terkait dengan hal ini, peneliti melakukan penelitian terdapat perspektif hukum positif dan hukum Islam mengenai judul peneliti yaitu

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), h. 2

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,, h. 7

mengenai pengangkatan Anak Angkat dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁸

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analitis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, cepat dan terarah.¹⁹

2. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi lapangan merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar belakang atau suatu tempat penyimpanan peristiwa tertentu yang berdasarkan di lapangan.²⁰

Alasan menggunakan studi lapangan adalah karena penelitian ini akan meneliti secara mendalam mengenai Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang).

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 2006), h. 6

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 105

¹⁹ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 63

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmia*, (Bandung : Raja Wali Pres, 1994), h. 139

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang. Partisipan dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera, yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti atau totalitas objek psikologis yang terbatas oleh kriteria tertentu, yang seluruhnya berjumlah 44 orang berdasarkan jumlah keseluruhan objek penelitian.²¹

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi besar, dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel *random sampling*, menurut Sugiono teknik *random sampling* ini adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.²² Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 2 orang terdiri dari 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera yaitu bapak Shalahuddin dan ibu Zulhaidah yang berada di Pengadilan Agama Kelas A Tingkat I Tanjung Karang.

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta cv, 2011), h.80.

²²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,,h.120.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan *survey* yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis dalam suatu penelitian.²³ Mengenai penulisan ini, penulis mengamati objek yang berada di lapangan.

b. Wawancara

Yaitu suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.²⁴ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan seperti petugas di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang yaitu bapak Shalahudin dan ibu Zulhaidah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel berupa, catatan, buku, jurnal, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁵

²³ Soeranto Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : STIM YKPN, 2008), h.46

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, (Jakarta : Kencana, 2014), h.373

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 391

5. Prosedur Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.²⁶ Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian (*research*). Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut. Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan dengan analisis data.²⁷

Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu penelitian memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang telah berhasil dikumpulkan memenuhi kualifikasi, maka data dapat disiapkan untuk keperluan pada proses berikutnya.

Setelah data sudah terkumpul, kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yakni metode deduktif. Metode deduktif adalah “suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum” Metode deduktif digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang berdasarkan pada akidah dalam pandangan hukum

²⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Dasar*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004) h. 72

²⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid*, h. 68

positif dan hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat dan Anak Angkat sehingga pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang pada suatu ketentuan hukum dan secara khusus yang kemudian ditarik kepada unsur-unsur kesamaanya untuk mendapatkan pemahaman para ahli secara umum.²⁸

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1.) Data Primer

Data Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, UU, SEMA dan lain sebagainya maupun bahan hukum dari masa ke masa yang berlaku dan telah diberlakukan. Kemudian kaitanya penelitian ini adalah upaya untuk mencari data-data yang berdasarkan pada suatu ilmiah atau buku-buku yang berkaitan dengan Prosedur Pengangkatan Anak dan Tinjauan hukum positif dan hukum Islam Terhadap Pengangkatan anak .

2.) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dari bahan-bahan hukum primer. Kemudian kaitanya

²⁸Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, tanggal 4 mei 2019 Pukul 12.30 WIB.

dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari penelitian lapangan, buku jurnal, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, sehingganya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

3.) Data Tersier

Ialah suatu sumber data yang kegunaannya guna memberikan suatu petunjuk terhadap bahan-bahan dari data primer dan sekunder,²⁹ yang mana berpatokan pada kamus, transkrip, katalog dan lain sebagainya, yang berkenaan dengan judul peneliti.

b. Metode Pengolah Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.³⁰ Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data tersebut konsisten atau tidak.³¹ Karena dalam proses *editing* mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang dikumpulkan oleh peneliti akan mengetahui apakah data tersebut cukup

²⁹ Muhammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 53.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 118

³¹ Suharmi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001), h. 161

akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini.

2.) Sistematisasi Data (*Sistematizing*)

Sistematizing yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.³² Data yang dikumpulkan penulis akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada.



³²*Ibid*, h. 126

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter country adoption* dituangkan dalam PP nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Menurut PP pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan orang tua angkatnya.

Pengertian pengangkatan ini tidak cukup tercermin sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak. Menurut UU perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan

pengadilan.¹ Jadi Pengertian Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.²

b. Sejarah Pengangkatan Anak

Sejarah pengangkatan anak dalam perundang-undangan banyaknya masyarakat yang melakukan pengangkatan anak. Motif dan kebutuhan pengangkatan anak semakin bertambah membutuhkan suatu kepastian hukum, maka dibutuhkanlah lembaga yang dapat membuktikan kepastian tersebut.

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata (*Burgelijke Wetboek*), penganturan permasalahan pengangkatan anak ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak ini diatur dalam *Staatblad* 1971 No.129, yang isinya dalam peraturan tersebut diterapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagaimana anak laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki.³

Dalam sejarah perundang-undangan, peraturan tentang pengangkatan anak ini sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam rancangan undang-undang (RUU) perkawinan dan rancangan undang-undang (RUU) peradilan anak. Dalam proses

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.105.

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Edisi Revisi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h.35 .

³ Soedarjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), h.38.

pembukuan hukum Undang-undang RI No.1 tahun 1974, RUU perkawinan mengatur tentang pengangkatan anak dalam pasal 62 sebagai berikut :

- 1.) Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih.
- 2.) Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin atau belum diangkat dengan orang lain.
- 3.) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus 18 tahun dibawah suami dan 15 tahun di bawah istri.
- 4.) Apabila anak yang diangkat masih saudara dari suami istri, dalam hubungan keluarga ia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkat.
- 5.) Untuk pengangkatan anak diperlakukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan dari anak itu sendiri.
- 6.) Pengangkatan anak dilakukan dengan putusan pengadilan atas permohonan pengangkatan anak itu sendiri.
- 7.) Permohonan yang dimaksud ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan itu menguntungkan kepentingan anak yang diangkat.
- 8.) Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum yang sama seperti anak kandung sendiri.
- 9.) Pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarga sedarah.

10.) Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepatnya 2 tahun dan selambatnya 3 tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun.

11.) Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak angkat tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami istri yang mengangkatnya.

12.) Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan yang dimaksud ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.

Ketentuan pasal (RUU) dalam perkawinan ini menuai protes keras dari umat Islam karena bertentangan dalam hukum Islam. Hasil Ulama musyawarah Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan agar pasal 62 diubah sebagai berikut :

- 1.) Ayat 1-7 tidak ada usul perubahan
- 2.) Ayat 8 kata-kata “sama seperti” diubah menjadi “Tidak sama dengan”
- 3.) Ayat 9 kata-kata “putusnya” diubah menjadi “Tidak putus”
- 4.) Ayat 10 tidak ada usul perubahan
- 5.) Ayat 11 dihapuskan, sebagai akibat usul perubahan ayat (9)
- 6.) Ayat 12 dihapus dengan alasan yang sama

Rancangan Undang-undang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 sebagai hukum positif dengan menghapuskan seluruh pasal 62 yang mengatur tentang

pengangkatan anak pada Undang-undang tersebut. Sehingga Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mencantumkan aturan tentang pengangkatan anak.

Pada prinsip itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya masalah pengangkatan anak ini dalam Undang-undang RI No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang kemudia hanya dicantumkan dalam pasal 12 yaitu :

- 1.) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- 2.) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
- 3.) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan didasarkan dengan peraturan perundang-undang.

Ketentuan pasal tersebut menekankan bahwa dalam praktek pengangkatan anak, hal yang menjadi prioritas utama untuk diperhatikan adalah kesejahteraan anak. Tujuan dari pengangkatan anak tidak lagi untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi bergeser menjadi demi kepentingan kesejahteraan anak.⁴

Peraturan pengangkatan anak juga dapat dalam proses pembuatan hukum Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997. Berdasarkan amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomor

⁴ Musthofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*,(Bandung : Kencana, 2008), h.33.

R.12/PU/XI/1995, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tentang peradilan anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan disetujui. RUU tersebut mengatur kewenangan anak dalam pasal berikut :

Dalam pasal 2 menjelaskan bahwa sidang peradilan untuk anak selanjutnya disebut sidang anak, adalah persidangan di lingkungan peradilan umum, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Menurut ketentuan pasal 21 sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata dalam hal :

- 1.) Perkara anak nakal
- 2.) Perkara anak terlantar
- 3.) Perkara perwalian
- 4.) Perkara pengangkatan anak
- 5.) Perkara anak sipil

Ketentuan undang-undang diatas yang menegaskan bahwasahnya pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan umat Islam, karena bertentangan dengan hukum Islam. Rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi UU RI Nomor 3 tahun 1997 tentang

pengadilan anak sebagai *legal product* tanpa memasukan pengaturan tentang pengangkatan anak.⁵

Pengaturan mengenai pengangkatan anak juga diatur dalam UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pasal 39, pasal 40, dan pasal 41. Pengaturan mengenai pengangkatan anak ini banyak mengalami kemajuan, karena mengatur hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama, sehingga perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal tersebut. Hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain pengangkatan anak harus seagama dan tidak boleh memutuskan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.⁶

c. **Syarat Pengangkatan Anak dan Orang Tua Angkat**

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dituangkan dalam pasal 12 mengenai syarat pengangkatan anak diantaranya :

- a.) Anak yang akan diangkat harus belum berusia 18 tahun.
- b.) Calon anak angkat yang akan diangkat merupakan anak yang terlantar atau diterlantarkan.
- c.) Anak berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d.) Anak angkat memerlukan perlindungan khusus.

⁵Musthofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, ...,h. 35.

⁶*Ibid*, h.36.

Selain persyaratan anak angkat adapun juga persyaratan orang tua angkat diantaranya :

- 1.) Orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani.
- 2.) Orang tua angkat berumur paling rendah 30 tahun dan paling yang tinggi 50 tahun.
- 3.) Beragama sama dengan calon anak angkat tersebut.
- 4.) Berprilaku baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap anak angkat.
- 5.) Berstatus menikah minimal paling singkat 5 tahun.
- 6.) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 7.) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 8.) Orang tua angkat dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- 9.) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.⁷

d. Tujuan Pengangkatan Anak

Hakikat dari suatu perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam masyarakat suatu keluarga dianggap sebagai keluarga yang lengkap apabila keluarga tersebut terdiri dari suami, istri dan anak. Namun pada kenyataan banyak keluarga yang tidak lengkap atau dengan kata lain tidak memiliki anak. Hal tersebut disebabkan oleh

⁷Ni Nyoman Inten Trijayanti, Skripsi, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat dan Hukum Positif*, (Nusa Tenggara Barat : Universitas Mataram, 2007) , pada tanggal 9 Oktober pukul 12.14 Wib.

beberapa faktor, mungkin karena belum mempunyai anak atau bahkan pasangan suami istri tersebut memang tidak dapat memiliki anak. Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Imam Sudiyat dalam bukunya mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak, tetapi jarang pengangkatan anak juga dilakukan oleh keluarga yang sudah mempunyai anak. Dari hal tersebut diketahui bahwa bukan hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak saja yang dapat melakukan pengangkatan anak, namun mereka yang telah mempunyai anak pun dapat pula melakukan pengangkatan anak.⁸

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan negara yang pada dasarnya suatu tali ikatan yang suci itu akan menjadikan dasar setiap pasangan untuk saling berkompeten. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukan dalam mendapat harta waris dari orang tuanya.⁹

e. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat dan Anak Angkat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 39 ayat 1 tentang pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang

⁸ Imam Sudiyat, *Hukum Adat dan Sketsa*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), h.102.

⁹ Joejoen Tjhajani, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif", *JurnalIndependent*, Vol. 5, No. 1, h.7

terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Dengan demikian pengangkatan seorang anak pada dasarnya akan sangat berdampak positif bagi kedua belah pihak yaitu kepentingan orang tua angkat dan kepentingan anak. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan mengenai hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat sebagai berikut:

- 1.) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2.) Orang tua angkat wajib memelihara dan mendidik anak angkatnya sama seperti anak kandungnya.
- 3.) Orang tua angkat wajib memberikan biaya pendidikan.
- 4.) Orang tua angkat tetap berkewajiban untuk memelihara dan memberikan biaya kepada anak apabila anak tersebut lalai dan berkelakuan buruk.
- 5.) Anak yang belum dewasa (dibawah 18 tahun atau belum menikah) berhak diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
- 6.) Orang tua angkat berhak untuk dihormati oleh anak angkatnya.
- 7.) Apabila anak angkat sudah dewasa maka orang tua berhak mendapatkan pemeliharaan sesuai kemampuannya.¹¹

¹⁰ Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, h.225

¹¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.18.

Selain hak dan kewajiban orang tua angkat kepada anak angkatnya ada pula hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- 1.) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2.) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- 3.) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4.) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.¹²

Di samping hak-hak yang dijamin tersebut, anak-anak atau anak angkat memiliki kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga

¹² Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), h. 16.

harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- 1.) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- 2.) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3.) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- 4.) Memenuhi ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 5.) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹³

f. Akibat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak membawa akibat-akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara orang tua angkat dan anak angkat, dengan segala akibat yang timbul karenanya. Terutama akibat timbul pada orang tua asal orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri. Adapun akibat terhadap anak angkat, pertama-tama pengangkatan anak mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga, namun hapusnya hubungan hukum dengan pengecualian sebagai berikut :

- a.) Mengenai derajat kekeluargaan sedarah yang dilarang untuk melakukan perkawinan
- b.) Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar hal itu bersandar pada keturunan karena kelahiran

¹³Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.71.

- c.) Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyenderan
- d.) Mengenai pembuktian dan saksi
- e.) Mengenai bertindak sebagai saksi dalam perbuatan akta-akta otentik.

Selanjutnya anak yang diangkat tersebut menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, dengan demikian hubungan dengan semua anggota keluarga sedarah dari orang tua angkat. Sebagai anak sah, maka anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami istri yang mengangkat adalah pasangan suami istri. Jika yang mengangkat itu seorang laki-laki duda, maka ia dianggap lahir dari perkawinan yang telah bubar karena kematian. Jika yang mengangkat seorang janda, maka anak itu dianggap dari perkawinan janda dengan suaminya yang almarhum itu, namun dengan pengertian bahwa anak itu hanya dapat bertindak sebagai ahli waris dari suaminya apabila pengangkatannya dilakukan dalam tenggang waktu enam bulan sejak suami janda meninggal atau dalam tenggang waktu enam bulan janda tersebut meminta izin pada pengadilan untuk melakukan pengangkatan anak (menurut ketentuan dalam pasal 9 Staatsblad. 1917 No. 129) dan pengangkatan anak dilakukan dalam tenggang waktu satu bulan setelah izin itu diperoleh.

Apabila yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sedarah baik keluarga yang sah maupun luar kawin, maka terhadap garis ketentuan kedua belah pihak yang sama, dengan pengangkatan

anak tersebut anak akan memperoleh derajat keturunan sebelumnya. Kedudukan anak akan memperoleh derajat keturunan sebelumnya. Kedudukan sebagai seorang anak sah membawa akibat secara umum itu mempunyai hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya, sedangkan hubungan waris mewaris dengan orang tua asalnya menjadi hapus. Demikian juga kekuasaan orang tua terhadapnya beralih dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat (dalam hal dan selama anak itu belum dewasa). Sedangkan terhadap orang tua angkat dengan pengangkatan anak, maka lahir hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris mewaris. Hubungan yang lahir karena pengangkatan anak itu tidak semata-mata hubungan anak angkat dan orang tua angkat saja, melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semeda, dengan segala akibatnya.¹⁴ Dalam *Staatsblad* 1917 Nomotr 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan anak perkawinan orang tua angkat. Akibatnya adalah dengan pengangkatan anak tersebut, anak terputus hubungan perdata yang berpangkal

¹⁴Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*,, h.80.

kepada keturunan karena kelahiran, oleh karena itu, secara otomatis, hak dan kewajiban seorang anak angkat sama dengan anak kandung harus merawat dan menghormati orang tua, layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat.¹⁵

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut :

- a.) Hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung
- b.) Hubungan waris, dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
- c.) Hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
- d.) Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, dalam hal ini akan tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

¹⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.36.

Selain akibat hukum yang mengkaitkan hak dan kewajiban anak setelah diangkat oleh orang tua angkatnya, terdapat juga akibat anak tersebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbuatan pengangkatan anak tersebut akibat hukum dengan orang tua dan orang tua angkat.¹⁶

g. Prosedur Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak. Di samping hukum acara perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. Prosedur pengangkatan anak baik antar-WNI, ataupun antar-WNI dan WNA akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.¹⁷

¹⁶Rosidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.168.

¹⁷Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,,h.58.

Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia (WNI). Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar WNI harus diperhatikan tahap-tahap persyaratan sebagai berikut :

a. Syarat dan bentuk surat permohonan :

- 1.) Sifat surat permohonan bersifat *Voluntair*
- 2.) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- 3.) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan dan tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 4.) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- 5.) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka pemohon diajukan ke pengadilan Agama dan mewilayahi tempat tinggal pemohon.¹⁸

¹⁸Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, *Ibid*, h.59

b. Isi surat permohonan pengangkatan anak

- 1.) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2.) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- 3.) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B”. Tanpa ditambahkan bahkan pemerintahan lain, seperti : “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”.¹⁹

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Pengangkatan Anak

Agama Islam telah mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin terlantar. Tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT. Ulama fikih

¹⁹*Ibid*, ..., h.60.

menyatakan bahwa pengangkatan anak menurut hukum islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang dipraktekan masyarakat terdahulu, Hukum islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan anak.²⁰ Pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak ‘nasabnya’ sendiri, menurut pandangan Hukum Islam hukumnya mubah atau boleh saja. Dijelaskan dalam Al-Quran yang terdapat dari surat Al-Ahzab ayat 4-5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya :

“ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak

²⁰Ahmad Syafii, Adopsi dalam Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2007), h.56.

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). “ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan penjelasan surat di atas bahwa pengangkatan anak ini tidak mempunyai pengaruh selain hanya sekedar sebagai suatu amal sosial yang terpuji, di samping itu juga karena mempunyai berbagai latar belakang yang positif. Maka menurut pandangan Hukum Islam status hukumnya boleh saja atau bahkan dianjurkan (sunah).²¹

b. Sejarah Pengangkatan Anak

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal dan sudah berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya dan diperaktikan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang diperaktikan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun-menurun.

²¹Ahmad Syafii, Adopsi dalam Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa*, ..., h.66.

Imam Al-Qurrtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW. Sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya, tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW. Dengan nama Zaid bin Muhammad pengangkatan Zaid sebagai anaknya diumumkan oleh Muhammad SAW. Juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, turunlah ayat al-ahzab (33) ayat 4-5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya :

“ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). “

“ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Pengangkatan anak yang satu intinya melarang dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunya ayat tersebut.

Dengan demikian pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemaharaman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu pihak kemaharaman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi. Dalam hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” *al-Laqith*, yaitu anak yang dipungut dan tidak jelas asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan di pinggir jalan, dan orang yang menemukannya itu mengakui sebagai anaknya, maka *nasab* ana itu dapat di *nasab* kan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.²²

Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fikih, untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang. Secara hukum tidak dikenal perpindahan *nasab* dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan

²²Ahmad Kamil, Muhammad fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,*, h.98.

perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya. Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum lainnya menjadi perpindahan *nasab* dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya dan keluarga kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua belah pihak saling mewarisi. Jika ia akan melangsungkan perkawinan nantinya, maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah angkatnya tersebut, bukan ayah kandungnya. Ada dua hal yang terkait dengan status hukum anak angkat, yaitu dalam hal kewarisan, dan dalam hal perkawinan.²³

Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi yaitu :

- 1.) Karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qarabah*
- 2.) Karena hasil perkawinan yang sah *al-mushahahar*
- 3.) Karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau faktor karena salaing tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.

Dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan anak (*tabanni*) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (adopsi) yang dikenal dengan hukum sekuler. Perbedaanya terletak pada aspek mempersamakan anak kandung

²³*Ibit*, h.101.

dengan anak sendiri, menjadikan anak angkat dengan menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung.²⁴

c. Syarat Pengangkatan Anak dan Orang tua Angkat

Islam tidak mengatur secara jelas mengenai syarat dalam pengangkatan anak, akan tetapi dalam perwalian Islam menetapkan syarat menjadi seorang wali anak angkat, adapun syarat tersebut :

- 1.) *Baligh* dan berakal, serta cakap bertindak hukum. Oleh sebab itu anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang dungu tidak bisa dijadikan wali.
- 2.) Agama wali sama dengan agama orang yang diangkatnya, karena perwalian nonmuslim terhadap muslim adalah tidak sah.
- 3.) Adil dalam artian *istiqamah* dalam agamanya berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadianya.
- 4.) Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemasalahatan orang yang diangkatnya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah maka tidak sah untuk menjadi wali.²⁵

d. Tujuan Pengangkatan Anak

Dalam kajian hukum Islam mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh

²⁴ *Ibid*, 103.

²⁵ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), h.172.

orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Dan mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mawaris harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak dalam hukum Islam sebagai berikut :

- 1.) Mendidik dan menyekolahkan anak secara hukum Islam, yaitu anak memiliki kedudukan tersendiri yang harus didasarkan pada petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran karena Al-Quran tidak hanya membahas tentang kewajiban anak kepada orang tua saja melainkan kewajiban orang tua kepada anaknya.
- 2.) Merawat dan memelihara anak yang tidak mampu, miskin dan terlantar. Merawat dan memelihara anak itu didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT.
- 3.) Memberikan kasih sayang tanpa memberi status anak kandung, namun anak angkat tersebut diperlakukan dan diberi kasih sayang seperti anaknya sendiri.²⁶

Sudah dapat disimpulkan kembali bahwa tujuan pengangkatan anak yaitu mendidik atau menyekolahkan, merawat atau memelihara, dan memberikan kasih sayang. Dan tujuan pengangkatan anak anatara lain adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga,

²⁶ Haedah Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, *JurnalDinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, (Mei 2009), h.155.

dalam hal suatu perkawinan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang kebanyakan belum atau telah divonis dokter tidak mungkin mempunyai anak, sebagai penerus perjuangan keluarga, yang diharapkan mendapat doa di kala orang tua angkat meninggal dunia.²⁷

e. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat dan Anak Angkat

Berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak bahwa hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat dapat diketahui sebagai berikut :

- 1.) Anak angkat tidak boleh memutuskan darah antara orang tua angkat dan orang tua biologis dan keluarganya, dan orang tua angkat pun tidak boleh memutuskan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya.
- 2.) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3.) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda sebagai tanda pengenalan saja.
- 4.) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

²⁷ Ahmad Kamil, Muhammad fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,, h.106.

Dari penjelasan di atas tentang Hak dan Kewajiban orang tua angkat dan anak angkat tersebut adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya maka diperlukannya hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat.²⁸

f. Akibat Pengangkatan Anak

Akibat hukum pengangkatan anak yang ditimbulkan dari anak angkat itu sendiri yaitu untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi haram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahi. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.

Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan,

²⁸ Sumiati Usman, Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I, No.4, (Oktober 2013), h.144.

sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Islam, kata Wahbah Az-Zuhaili (seorang ahli hukum Islam dari suriah) adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. Rasulullah Saw. Bersabdah bahwa “anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya (maksudnya ayahnya). Dengan demikian, anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.”²⁹

Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama denganya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut :

²⁹Ahmad Kamil, Muhammad fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,, Ibid*, h.117.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya :

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dari ayat di atas sudah dijelaskan dan para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan saja, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam.³⁰

g. Prosedur Pengangkatan Anak

Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW, mengumumkan dihadapan kaum Quraisy dan berkata : “ Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya”. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para

³⁰*Ibid*,h.119.

sahabatpun memanggilnya dengan nama Zaid Muhammad surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5 .

Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut juga istilah *Tabanny*, mengemukakan sebagai berikut :

“ Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah *tabanny* perlu dipahami bahwa *tabanny* itu ada dua bentuk, salah satu diantaranya adalah bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. “

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*Tabanny*) yang dipahami dalam perspektif hukum Islam Yaitu :

- 1.) Untuk pengangkatan anak (*Tabanny*) yang dilarang sebagaimana *Tabanny* yang diperaktekan oleh masyarakat *jahilliyah* dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.
- 2.) Pengangkatan anak (*Tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dll. Tanpa harus memutuskan hubungan

hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikanya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.³¹

Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa prosedur pengangkatan anak sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah mengangkat Zaid, di hadapan rakyat Quraisy dan dalam dua jenis *Tabanny* terdapat dua yaitu *Tabanny* yang dianjurkan dan dilarang.

B. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran penelitian selama ini belum ada yang membahas secara spesifik terkait dengan judul skripsi “Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang) “.

Pertama, hasil penelitian atau skripsi, M. Deby Sahdan Alfaizi dengan judul “ Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga). Penelitian yang dilakukan oleh M. Deby Sahdan Alfaizi menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif yaitu suatu analisis data di mana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu keluarga yang mengangkat anak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Deby Sahdan Alfaizi menyatakan masyarakat Duren Tiga memandang bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung dan paling utama dari pengangkatan anaknya tidak adanya

³¹ Happy Budyana Sari, Tesis, *Konsep Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Semarang : Universitas Diponogoro, 2009), Pada Tanggal, 26 Oktober 2019, Pukul 09.53 Wib.

larangan ajaran Islam yang dijalankan. Mengenai tradisi di Duren Tiga warga yang mengangkat anak mengakui tidak ada tradisi khusus, hanya pengangkatan anak dilakukan dengan motif untuk menyalurkan kasih sayang karena sebagai tabiat suami/isteri mendidik, mengasuh, dan menjaga anak. Akibat dari tradisi pengangkatan anak di Duren Tiga memiliki suatu hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya yang baik, oleh karenanya orang tua angkat dan kandung harus saling mengawasi dan mendidik demi kesejahteraan anak.³²

Kedua, skripsi dari Nita Atria yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak (Studi Kasus Masyarakat Desa Hujung Kecamatan Belalau Lampung Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak masyarakat Desa Hujung Kecamatan Belalau Lampung Barat dan untuk mengetahui bagaimana batas perwalian anak angkat menurut Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan oleh Nitra Atria adalah penelitian *Filed Research* yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya, dan sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analisis*, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nitra Atria yaitu proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Hujung Kecamatan Belalau yaitu dengan cara bermusyawarah antara keluarga serta melakukan kesepakatan mengenai pengangkatan anak

³² M. Deby Sahdan Alfaizi, Pengangkatan Anak (Studi di Masyarakat Duren Tiga), (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Al-Syakhsyah) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

tersebut dan ada juga yang melakukan proses menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan isi kesepakatan yang telah mereka musyawarahkan sebelumnya. Dan batas-batas kewenangan orang tua angkat terhadap anak angkat menurut hukum Islam adalah orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, pendidikan, kasih sayang, harta, tindakan hukum, namun tidak termasuk wali nikah jika anak angkat tersebut adalah anak perempuan.³³

Ketiga, skripsi dari Eva Yuliana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Pengangkatan Anak (Studi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Penelitian ini dilakukan oleh Eva Yuliana menggunakan metode penelitian yang bersifat lapangan (*Field Research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari *interview* dengan warga masyarakat yang telah mengasuh anak angkat, dan penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak maksudkan untuk menguji *Hipotesis*. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Eva Yuliana yaitu proses pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat bahwa masyarakat di sana masih menggunakan cara di bawah tangan yaitu hasil disaksikan oleh tokoh adat dan tetangga-tetangga setempat. Dan tinjauan hukum Islam

³³ Nita Atria, Analisis Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak (Study Kasus Masyarakat Desa Hujung Kecamatan Belalau Lampung Barat), (Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015).

dan Undang-undang 3 Tahun 2006 terhadap pengangkatan anak di Tiuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu mengenai pengangkatan anak sangat bertentangan dengan hukum Islam pada prakteknya diakui sebagai anak kandung serta dinasabkan kepada orang tua angkat sehingga berakibat pada hak-hak perwalian dan perwarisanya dinisabatkan kepada orang tua angkat.³⁴



³⁴ Eva Yuliana, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Pengangkatan Anak (Studi di Tiuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat), (Skripsi Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2017).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Kitab Al-Quran & Hadis :

Departemen Agama RI, 2011, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Al-Kautsar).

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Diponogoro).

Buku :

Ahmad Al-Barry Zakariya, 1997, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta :Bulan Bintang).

Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika).

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia).

Efendi Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana)

Fuady Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers)

Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara).

Kamil Ahmad, Fauzan Muhammad, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada)

Kansil, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Bina Ilmu).

Kartono Kartini, 2006, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Mandar maju).

Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, (Jakarta : Kencana)

Musthofa SY, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Bandung : Kencana)

Nasir. M, 1988, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia).

Nasution S, 2004, *Metode Penelitian Dasar*, (Jakarta : Bulan Bintang).

Pandika Rusli, 2014, *Hukum Pengakatan Anak*. (Jakarta : Sinar Grafika).

Sembiring Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).

Soekanto Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press).

Soeranto Lincoln Arsyad, 2008, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : STIM YKPN).

Soimin Soedarjo, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika)

Sudiyat Imam, 1981, *Hukum Adat dan Sketsa*, (Yogyakarta : Liberty)

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alvabeta cv)

Suharmi Arikunto, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdaya Karya)

Wahab Khalab Abdul, 1423 H, *Ushul Fiqh*, (Kairo : Maktabah Tijariah Al-Kubro).

Winarno Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmia*, (Bandung : Raja Wali Pres).

W. Kusumah Mulyana, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta : Rajawali).

Yusuf Muri, 2014, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan gabungan)*, (Jakarta : Kencana).

Zaini Muderis, 2006, *Adopsi Satuan Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika).

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*

Artikel &Jurnal :

Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Eva Yuliana, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Pengangkatan Anak (Studi di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat), (Skripsi Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2017).

Faidi Acmad, 2018, Reconstruction of the National Legal System : Study the Implementation of the Maqasid al-Shariah Theory, (*Jurnal al-Adalah*).

Faradz Haedah, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Dinamika Hukum*.

Handayani Hilda, Pengertian Metode Induktif dan Deduktif, Diakses Dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Deduktif>, tanggal 4 mei 2019 Pukul 12.30 WIB.

Happy Budyana Sari, *Tesis*, Konsep Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam, (Semarang : Universitas Diponogoro, 2009), Pada Tanggal, 26 Oktober 2019, Pukul 09.53 Wib.

M. Deby Sahdan Alfaizi, Pengangkatan Anak (Studi di Masyarakat Duren Tiga), (*Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Al-Syakhsyah)* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Ni Nyoman Inten Trijayanti, *Skripsi*, Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat dan Hukum Positif, (Nusa Tenggara Barat : Universitas Mataram, 2007) , pada tanggal 9 Oktober pukul 12.14 Wib.

Nita Atria, Analisis Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak (Study Kasus Masyarakat Desa Hujung Kecamatan Belalau Lampung Barat), (*Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015).

Syafii Ahmad, Adopsi dalam Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa*.

Sumiati Usman, Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris, *Jurnal Lex Privatum*.

Tjhajani Joejoen, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif", *Jurnal Independent*.